PERAN KELEMBAGAAN DALAM EFISIENSI PASAR : MENGURANGI BIAYA TRANSAKSI DI PASAR TRADISIONAL DAN MODERN

Barli[1], Febrianty M Rajagukguk[2], Gita[3], Indra[4], Ratri Andini Suwanda[5], Rizki Amanda[6]
barlimodon@gmail.com[1], febriantyrajagukguk@gmail.com[2], gitag6495@gmail.com[3], ddraa000@gmail.com[4], ratriandinisuwanda@gmail.com[5], mandamandarizki@gmail.com[6]
Universitas Palangka Raya

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of institutions in enhancing market efficiency by reducing transaction costs in traditional and modern markets in Palangka Raya City. The research employed a descriptive qualitative approach with case studies conducted in two traditional markets and one modern market. Data were collected through direct observation, in-depth interviews with 15 traders, 20 consumers, and 5 market managers, as well as documentation of regulations and transaction records. Data analysis was carried out using the Miles & Huberman (1994) interactive model, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that traditional markets are dominated by informal institutions such as social norms, trust, and trader reputation, which help reduce bargaining costs but still face high information and monitoring costs. In contrast, modern markets rely on formal institutions including contracts, quality standards, SOPs, and the use of information technology, which reduce information and monitoring costs but limit social interaction flexibility. This study concludes that combining formal and informal institutions is the most effective strategy to improve market efficiency.

Keywords: *Institutions, Market Efficiency, Transaction Costs, Traditional Markets, Modern Markets.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kelembagaan dalam meningkatkan efisiensi pasar melalui pengurangan biaya transaksi pada pasar tradisional dan modern di Kota Palangka Raya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada dua pasar tradisional dan satu pasar modern. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan 15 pedagang, 20 konsumen, dan 5 pengelola pasar, serta dokumentasi berupa peraturan dan catatan transaksi. Analisis data dilakukan dengan model Miles & Huberman (1994) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar tradisional didominasi oleh kelembagaan informal berupa norma sosial, kepercayaan, dan reputasi pedagang yang mampu menekan biaya negosiasi, namun masih menghadapi biaya pencarian informasi dan pengawasan yang tinggi. Sebaliknya, pasar modern ditopang oleh kelembagaan formal berupa kontrak, standar mutu, SOP, serta pemanfaatan teknologi informasi yang menurunkan biaya pencarian informasi dan pengawasan, meskipun mengurangi fleksibilitas interaksi sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi kelembagaan formal dan informal merupakan strategi terbaik untuk meningkatkan efisiensi pasar.

Kata Kunci: Kelembagaan, Efisiensi Pasar, Biaya Transaksi, Pasar Tradisional, Pasar Modern.

PENDAHULUAN

Pasar merupakan institusi ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mendistribusikan barang dan jasa, sekaligus menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli. Efisiensi pasar tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme permintaan dan penawaran, tetapi juga oleh kelembagaan yang mengatur interaksi antar pelaku ekonomi. Menurut North (1990), kelembagaan adalah seperangkat aturan formal maupun informal yang membentuk struktur insentif dalam aktivitas ekonomi, sehingga dapat menciptakan

keteraturan, mengurangi ketidakpastian, dan menekan potensi konflik dalam transaksi.

Permasalahan utama yang sering dihadapi dalam dinamika pasar adalah tingginya biaya transaksi. Williamson (1985) mengelompokkan biaya transaksi ke dalam tiga kategori, yaitu biaya pencarian informasi (information cost), biaya negosiasi atau tawar-menawar (bargaining cost), serta biaya pengawasan dan penegakan kontrak (enforcement cost). Biaya-biaya ini muncul karena adanya asimetri informasi, ketidakpastian, serta keterbatasan kelembagaan yang mengatur hubungan antara pelaku ekonomi.

Di Indonesia, pasar tradisional dan pasar modern memiliki peran yang sama penting dalam mendukung perekonomian. Pasar tradisional masih mendominasi terutama di daerah, menjadi tulang punggung distribusi kebutuhan sehari-hari masyarakat, serta berperan dalam menjaga budaya lokal melalui interaksi sosial. Dalam konteks pasar tradisional, kelembagaan formal yang diterapkan umumnya masih terbatas pada pengaturan retribusi, izin berdagang, serta tata kelola sederhana dari pemerintah daerah atau pengelola pasar. Kondisi ini membuat pasar tradisional rentan terhadap permasalahan seperti harga yang fluktuatif, informasi yang tidak transparan, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Meski demikian, pasar tradisional tetap memiliki kekuatan dalam bentuk kelembagaan informal, seperti norma sosial, hubungan kekerabatan, dan kepercayaan antarpedagang maupun dengan konsumen. Mekanisme sosial ini seringkali mampu menekan biaya negosiasi, karena transaksi didasarkan pada asas saling percaya dan hubungan jangka panjang.

Berbeda halnya dengan pasar modern yang umumnya dikelola dengan sistem kelembagaan formal yang lebih terstruktur. Kehadiran aturan kontraktual, standar kualitas barang, sistem pembayaran yang transparan, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadikan biaya pencarian informasi dan biaya pengawasan relatif lebih rendah. Pasar modern lebih mampu menciptakan efisiensi melalui penerapan manajemen yang profesional, meskipun seringkali mengorbankan fleksibilitas interaksi sosial yang menjadi ciri khas pasar tradisional. Namun, keberadaan pasar modern juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi pasar tradisional, karena mengubah preferensi konsumen yang semakin menuntut kenyamanan, efisiensi, dan kepastian harga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara lebih mendalam bagaimana peran kelembagaan—baik formal maupun informal—dapat mengurangi biaya transaksi di pasar tradisional dan modern. Penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi strategis terkait penguatan kelembagaan, khususnya pada pasar tradisional, agar mampu meningkatkan daya saing dan bertahan di tengah dominasi pasar modernbisa.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Efisiensi Pasar

Efisiensi pasar pada dasarnya menggambarkan kondisi di mana mekanisme pasar mampu mencerminkan seluruh informasi yang relevan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya dalam proses pertukaran (Fama, 1970). Dalam literatur keuangan, efisiensi pasar biasanya dikaitkan dengan konsep efficient market hypothesis (EMH) yang menekankan bahwa harga aset mencerminkan semua informasi yang tersedia. Namun, konsep ini juga dapat diperluas ke pasar barang dan jasa. Dalam konteks ini, efisiensi pasar tidak hanya menyangkut tercerminnya informasi pada harga, tetapi juga berkaitan dengan kelancaran proses transaksi yang meminimalkan biaya tambahan.

Efisiensi pasar dapat ditinjau dari dua dimensi. Pertama, efisiensi harga, yaitu sejauh mana harga mampu mencerminkan informasi mengenai kualitas, ketersediaan, dan nilai barang. Kedua, efisiensi proses, yaitu sejauh mana aktivitas pertukaran berlangsung tanpa memunculkan biaya tambahan yang tidak perlu, seperti waktu yang terbuang,

kesalahpahaman dalam negosiasi, atau ketidakpastian dalam pemenuhan kesepakatan.

Dalam konteks pasar tradisional dan modern, efisiensi harga seringkali lebih mudah dicapai di pasar modern karena adanya label harga yang jelas dan sistem pencatatan yang transparan. Sementara itu, pasar tradisional cenderung menghadapi tantangan dalam menjaga efisiensi harga karena mekanisme tawar-menawar yang dapat menimbulkan perbedaan harga untuk barang sejenis. Meski demikian, pasar tradisional kadang lebih unggul dalam efisiensi proses pada hubungan jangka panjang, karena adanya faktor kepercayaan yang mempersingkat negosiasi.

Dengan demikian, efisiensi pasar bukan hanya persoalan harga yang wajar dan transparan, tetapi juga soal berkurangnya biaya transaksi yang timbul dari proses jual beli itu sendiri.

Biaya Transaksi

Konsep biaya transaksi diperkenalkan secara komprehensif oleh Williamson (1985) dalam kerangka Transaction Cost Economics (TCE). Biaya transaksi adalah segala bentuk biaya yang timbul karena adanya pertukaran antar individu atau organisasi, di luar harga barang itu sendiri. Biaya ini sering kali bersifat tidak terlihat, namun berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pasar.

Williamson (1985) membagi biaya transaksi ke dalam tiga komponen utama: (1)Biaya pencarian informasi (search and information costs) Biaya yang timbul ketika pelaku ekonomi berusaha menemukan mitra dagang, produk yang sesuai, atau informasi harga dan kualitas barang. Misalnya, konsumen di pasar tradisional harus mengelilingi beberapa kios untuk membandingkan harga, sementara di pasar modern informasi harga sudah tertera secara jelas. (2) Biaya negosiasi (bargaining and decision costs) Biaya yang muncul dalam proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Pada pasar tradisional, biaya ini bisa tinggi jika interaksi berlangsung lama. Namun, dalam hubungan yang berbasis kepercayaan, biaya ini bisa menurun karena pedagang dan konsumen telah saling memahami. (3)Biaya pengawasan (monitoring and enforcement costs) Biaya untuk memastikan bahwa kesepakatan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Di pasar tradisional, pengawasan lebih sulit dilakukan karena standar mutu barang tidak baku. Sebaliknya, di pasar modern pengawasan relatif lebih mudah karena adanya kontrak, standar kualitas, serta mekanisme retur.

Besarnya biaya transaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, tingkat ketidakpastian, baik dalam ketersediaan barang, fluktuasi harga, maupun kualitas produk. Kedua, spesifisitas aset, yaitu sejauh mana barang atau jasa memiliki nilai yang khusus dan sulit dialihkan ke penggunaan lain. Semakin tinggi spesifisitas, semakin tinggi pula risiko dan biaya pengawasan. Ketiga, frekuensi transaksi, di mana interaksi yang sering dan berulang biasanya menurunkan biaya transaksi karena adanya pembelajaran dan pembentukan kepercayaan.

Secara keseluruhan, pengelolaan kelembagaan yang baik—baik formal maupun informal—dapat menekan ketiga jenis biaya transaksi tersebut, sehingga meningkatkan efisiensi pasar secara keseluruhan.

Kelembagaan Ekonomi

North (1990) mendefinisikan kelembagaan sebagai “aturan main” dalam masyarakat yang membentuk interaksi antar individu. Ia membagi kelembagaan menjadi dua bentuk utama. Pertama, aturan formal yang meliputi hukum, regulasi, kontrak, serta berbagai ketentuan pemerintah yang bersifat tertulis dan memiliki kekuatan sanksi legal. Aturan formal memberikan kepastian hukum, menjamin hak dan kewajiban para pelaku, serta menciptakan kerangka regulatif yang jelas dalam aktivitas ekonomi. Kedua, aturan informal yang meliputi norma, tradisi, adat, kebiasaan, nilai, dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Aturan informal tidak tertulis, tetapi memiliki daya ikat yang kuat karena

berakar pada modal sosial dan legitimasi komunitas.

Kedua bentuk kelembagaan ini sama-sama berperan penting dalam menekan ketidakpastian, mengurangi potensi konflik, dan meminimalisasi peluang terjadinya perilaku oportunistik, seperti penipuan, pengingkaran kesepakatan, atau manipulasi harga. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan baru (new institutional economics), kelembagaan dilihat sebagai instrumen utama untuk menurunkan biaya transaksi dengan menyediakan struktur insentif yang lebih efisien.

Scott (2014) kemudian memperluas analisis kelembagaan melalui konsep tiga pilar. Pilar regulatif menekankan aturan formal yang dilengkapi mekanisme sanksi dan insentif. Pilar normatif menyoroti nilai, standar, serta ekspektasi sosial yang memandu perilaku individu dalam interaksi sehari-hari. Sementara itu, pilar kognitif berhubungan dengan kerangka berpikir, keyakinan bersama, dan persepsi yang dianggap wajar oleh masyarakat. Kombinasi ketiga pilar ini menciptakan keteraturan dan stabilitas sosial, sehingga interaksi ekonomi dapat berlangsung dengan lebih lancar dan efisien.

Dalam konteks pasar, interaksi antara aturan formal dan informal sangat penting. Aturan formal memberikan kepastian mengenai aspek legal seperti kepemilikan kios, tarif retribusi, standar kualitas, hingga mekanisme retur. Di sisi lain, aturan informal seperti budaya tawar-menawar, reputasi pedagang, atau norma kejujuran membentuk kepercayaan antara penjual dan pembeli. Sinergi antara keduanya menciptakan sistem kelembagaan yang lebih kokoh: aturan formal menurunkan biaya pencarian informasi dan pengawasan melalui mekanisme transparansi dan sanksi legal, sedangkan aturan informal menurunkan biaya negosiasi dan memperkuat kepatuhan melalui kepercayaan dan sanksi sosial.

Dengan demikian, kelembagaan tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai mekanisme koordinasi yang membentuk perilaku pasar. Kombinasi yang tepat antara aturan formal dan informal akan menghasilkan tata kelola pasar yang mampu menekan biaya transaksi secara signifikan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya saing baik pada pasar tradisional maupun modern.

Pasar Tradisional dan Pasar Modern

Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan bentuk pasar yang tumbuh secara organik dalam masyarakat dan menjadi bagian penting dari kehidupan sosial-ekonomi di Indonesia. Karakteristik utama pasar tradisional adalah adanya sistem tawar-menawar yang memungkinkan pembeli dan penjual berinteraksi secara langsung untuk mencapai kesepakatan harga. Proses tawar-menawar ini seringkali bukan sekadar mekanisme ekonomi, tetapi juga sarana interaksi sosial yang memperkuat relasi antara pedagang dan konsumen.

Kelembagaan di pasar tradisional lebih banyak bersifat informal, berbasis pada norma, tradisi, dan jaringan sosial. Hubungan jangka panjang dan reputasi pedagang menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan konsumen. Misalnya, pedagang yang konsisten memberikan kualitas barang yang baik akan memperoleh loyalitas pelanggan tanpa perlu kontrak tertulis. Mekanisme sanksi sosial, seperti pengucilan pedagang yang tidak jujur, juga berperan sebagai bentuk pengawasan informal.

Namun, kelemahan pasar tradisional terletak pada tingginya biaya pencarian informasi. Konsumen harus mendatangi beberapa pedagang untuk membandingkan harga dan kualitas barang karena ketiadaan sistem publikasi harga. Selain itu, biaya pengawasan juga relatif tinggi karena tidak ada mekanisme formal yang menjamin kualitas dan standar mutu barang. Dengan demikian, meskipun biaya negosiasi relatif rendah berkat kepercayaan dan kedekatan sosial, ketidakpastian dalam harga dan kualitas masih menjadi kendala besar dalam efisiensi pasar tradisional.

Pasar Modern

Berbeda dengan pasar tradisional, pasar modern hadir dengan kelembagaan formal yang lebih kuat dan terstruktur. Ciri khas pasar modern adalah adanya harga tetap (fixed price) yang mengurangi kebutuhan untuk bernegosiasi. Harga dipublikasikan secara jelas melalui label atau sistem komputerisasi, sehingga konsumen tidak perlu mengeluarkan banyak waktu dan tenaga untuk membandingkan. Hal ini secara signifikan menurunkan biaya pencarian informasi.

Selain itu, pasar modern menerapkan kontrak dengan pemasok yang mengatur aspek harga, kualitas, volume, serta jadwal distribusi. Standar mutu barang lebih terjamin karena adanya SOP (Standard Operating Procedure) yang ketat, termasuk sistem retur barang apabila kualitas tidak sesuai. Keberadaan sistem pembayaran elektronik dan teknologi informasi seperti point of sales (POS) juga meningkatkan transparansi serta mengurangi risiko kesalahan transaksi. Hal ini membuat biaya pengawasan jauh lebih rendah dibandingkan dengan pasar tradisional.

Meskipun demikian, pasar modern memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas interaksi sosial. Hubungan antara penjual dan pembeli lebih bersifat transaksional dan impersonal, sehingga ikatan sosial yang biasanya memperkuat loyalitas jangka panjang di pasar tradisional menjadi berkurang. Selain itu, standar yang terlalu kaku dapat menyulitkan pedagang kecil untuk masuk ke rantai pasok pasar modern karena keterbatasan modal atau kemampuan memenuhi persyaratan formal.

Dari perspektif kelembagaan, pasar tradisional mengandalkan aturan informal untuk menekan biaya negosiasi, sedangkan pasar modern mengandalkan aturan formal untuk menurunkan biaya pencarian informasi dan biaya pengawasan. Dengan kata lain, pasar tradisional unggul dalam aspek sosial dan kepercayaan, sementara pasar modern unggul dalam aspek efisiensi struktural dan transparansi. Keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, sehingga strategi penguatan kelembagaan perlu mempertimbangkan kombinasi terbaik dari aturan formal dan informal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial-ekonomi yang terjadi di pasar, khususnya terkait peran kelembagaan dalam menekan biaya transaksi. Studi kasus dilakukan di tiga lokasi, yaitu dua pasar tradisional dan satu pasar modern di Kota Palangka Raya. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan variasi karakteristik kelembagaan, sehingga memungkinkan perbandingan yang lebih komprehensif antara pasar tradisional dan pasar modern.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik. Pertama, observasi langsung terhadap interaksi pedagang dan konsumen di lokasi penelitian, meliputi aktivitas tawar-menawar, pencarian informasi harga, serta mekanisme pengawasan informal maupun formal. Kedua, wawancara mendalam dengan 15 pedagang, 20 konsumen, dan 5 pengelola pasar. Teknik ini bertujuan menggali pandangan, pengalaman, dan strategi yang digunakan aktor pasar dalam mengatasi biaya transaksi. Informan dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam aktivitas pasar. Ketiga, dokumentasi berupa pengumpulan data sekunder dari peraturan daerah, catatan transaksi, arsip pengelolaan pasar, serta literatur terkait.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994). Analisis ini terdiri dari tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data, yaitu proses pemilahan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah

hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar lebih terfokus pada permasalahan penelitian. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, maupun matriks yang mempermudah peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar kategori. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu merumuskan temuan penelitian dengan memeriksa konsistensi dan keabsahan data. Untuk menjaga kredibilitas, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kelembagaan di Pasar Tradisional

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pasar tradisional di Kota Palangka Raya masih sangat bergantung pada kelembagaan informal. Mekanisme utama yang menekan biaya transaksi adalah kepercayaan dan reputasi pedagang. Konsumen cenderung membeli dari pedagang yang sudah dikenal atau direkomendasikan, sehingga proses tawar-menawar dapat berlangsung lebih singkat. Hubungan sosial yang erat juga mendorong adanya sistem hutang kepercayaan, di mana konsumen bisa membeli barang terlebih dahulu dan membayar kemudian. Hal ini menunjukkan adanya modal sosial yang berfungsi sebagai substitusi kelembagaan formal.

Namun demikian, pasar tradisional menghadapi tantangan berupa biaya pencarian informasi yang tinggi. Konsumen harus membandingkan harga dan kualitas barang dengan mengunjungi beberapa pedagang karena ketiadaan sistem publikasi harga. Selain itu, biaya pengawasan juga relatif besar karena tidak ada standar mutu atau mekanisme retur yang baku. Apabila konsumen merasa dirugikan, penyelesaiannya lebih banyak mengandalkan negosiasi personal daripada aturan formal. Temuan ini sejalan dengan pandangan North (1990) bahwa kelembagaan informal dapat menekan ketidakpastian, tetapi memiliki keterbatasan dalam menjamin kepastian hukum.

Peran Kelembagaan di Pasar Modern

Berbeda dengan pasar tradisional, pasar modern mengandalkan kelembagaan formal yang terstruktur. Harga produk dipublikasikan secara jelas melalui label dan sistem komputerisasi, sehingga biaya pencarian informasi relatif rendah. Konsumen tidak perlu menawar karena harga bersifat tetap, sehingga biaya negosiasi hampir tidak ada. Selain itu, kontrak dengan pemasok dan penerapan SOP memastikan standar kualitas barang, serta adanya mekanisme retur yang menekan biaya pengawasan.

Meskipun kelembagaan formal meningkatkan efisiensi, pasar modern cenderung kehilangan fleksibilitas sosial. Hubungan antara penjual dan pembeli bersifat transaksional, sehingga interaksi sosial yang menjadi ciri khas pasar tradisional berkurang. Beberapa pedagang kecil juga sulit masuk ke rantai pasok pasar modern karena keterbatasan modal dan kemampuan memenuhi standar formal. Dengan kata lain, pasar modern unggul dalam aspek efisiensi biaya transaksi, tetapi kurang dalam membangun kedekatan sosial.

Perbandingan Efisiensi Pasar Tradisional dan Modern

Jika dilihat dari tiga komponen biaya transaksi menurut Williamson (1985), terdapat pola yang berbeda. Pada pasar tradisional, biaya negosiasi cenderung rendah karena kepercayaan dan hubungan sosial, tetapi biaya pencarian informasi dan pengawasan relatif tinggi. Sebaliknya, pada pasar modern, biaya pencarian informasi dan pengawasan rendah karena adanya sistem formal, sementara biaya negosiasi hampir tidak ada karena harga sudah ditetapkan.

Tabel berikut merangkum perbandingan tersebut:,

Jenis Pasar	Biaya Pencarian Informasi	Biaya Negosiasi	Biaya Pengawasan	Dominasi Kelembagaan
Tradisional	Tinggi (harga tidak seragam, transparansi rendah)	Rendah (berbasis kepercayaan & reputasi)	Tinggi (pengawasan minim, standar mutu lemah)	Informal (norma sosial, kepercayaan, reputasi)
Modern	Rendah (harga jelas & transparan)	Rendah (harga tetap, tanpa tawar-menawar)	Rendah (SOP, kontrak, retur barang)	Formal (regulasi, kontrak, SOP, teknologi)

Hasil penelitian ini memperkuat teori North (1990) dan Scott (2014) mengenai peran kelembagaan formal dan informal. Pada pasar tradisional, norma sosial dan kepercayaan terbukti menekan biaya negosiasi, sedangkan pada pasar modern, aturan formal dan teknologi menurunkan biaya pencarian informasi serta pengawasan. Namun, penelitian ini juga menunjukkan adanya potensi komplementaritas: jika pasar tradisional mampu mengadopsi sebagian mekanisme formal (misalnya papan harga atau standar mutu sederhana), maka efisiensinya dapat meningkat tanpa harus kehilangan nilai sosial.

Bagi pengelola pasar dan pemerintah daerah, temuan ini memberikan rekomendasi strategis. Pertama, perlu ada intervensi kelembagaan formal di pasar tradisional, seperti regulasi harga referensi, transparansi informasi, dan mekanisme keluhan. Kedua, pasar modern sebaiknya tidak sepenuhnya mengabaikan kelembagaan informal, misalnya dengan membangun komunitas pelanggan atau program loyalitas berbasis kepercayaan. Dengan demikian, penguatan kelembagaan yang seimbang dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi pasar secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kelembagaan memiliki peran sentral dalam meningkatkan efisiensi pasar melalui penurunan biaya transaksi. Pada pasar tradisional, kelembagaan informal berupa kepercayaan, norma sosial, dan reputasi pedagang mampu menekan biaya negosiasi. Namun, kelemahan dalam transparansi harga dan standar mutu menyebabkan biaya pencarian informasi dan biaya pengawasan tetap tinggi. Sementara itu, pasar modern dengan kelembagaan formal seperti kontrak, SOP, standar mutu, dan pemanfaatan teknologi informasi mampu menekan biaya pencarian informasi serta biaya pengawasan, meskipun mengurangi fleksibilitas interaksi sosial.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kombinasi kelembagaan formal dan informal merupakan mekanisme yang paling efektif dalam menekan biaya transaksi. Penguatan kelembagaan formal di pasar tradisional dan pengembangan nilai sosial di pasar modern dapat menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan kohesi sosial.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan lokasi hanya terbatas pada dua pasar tradisional dan satu pasar modern di Kota Palangka Raya, sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasi untuk seluruh pasar di Indonesia. Kedua, penelitian ini berfokus pada aspek kualitatif dengan jumlah informan terbatas, sehingga belum menggambarkan secara kuantitatif besaran biaya transaksi yang sesungguhnya. Ketiga, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam dampak faktor eksternal seperti perkembangan digitalisasi perdagangan (e-commerce) yang juga berpotensi memengaruhi efisiensi pasar.

Saran

Bagi pengelola pasar tradisional dan pemerintah daerah, perlu meningkatkan kelembagaan formal melalui penyediaan papan informasi harga, standarisasi mutu barang,

serta sistem pengaduan konsumen. Langkah ini dapat menekan biaya pencarian informasi dan biaya pengawasan tanpa mengurangi fungsi sosial pasar tradisional.

Bagi pengelola pasar modern, disarankan untuk mengembangkan kelembagaan informal melalui program loyalitas konsumen, pendekatan personal, dan kegiatan sosial yang memperkuat hubungan jangka panjang dengan masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya, dianjurkan untuk memperluas cakupan penelitian ke wilayah lain serta menggunakan pendekatan kuantitatif, misalnya dengan mengukur besaran biaya transaksi secara numerik. Penelitian ke depan juga perlu memperhatikan integrasi antara pasar fisik dengan pasar digital, mengingat perkembangan teknologi semakin memengaruhi perilaku konsumen dan pedagang.berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Akerlof, G. A. (1970). Pasar “jeruk busuk”: Ketidakpastian kualitas dan mekanisme pasar. Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488–500. https://doi.org/10.2307/1879431

Fadeli, Y. A. (2021). Peran kelembagaan dalam menekan biaya transaksi pada pasar lokal di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Ekonomi Nusantara.

Fama, E. F. (1970). Pasar modal yang efisien: Tinjauan teori dan hasil empiris. Journal of Finance, 25(2), 383–417. https://doi.org/10.2307/2325486

Granovetter, M. (1985). Tindakan ekonomi dan struktur sosial: Masalah keterbenaman. American Journal of Sociology, 91(3), 481–510. https://doi.org/10.1086/228311

Grossman, S. J., & Stiglitz, J. E. (1980). Tentang kemustahilan pasar yang efisien secara informasi. American Economic Review, 70(3), 393–408.

McMillan, J. (2002). Menciptakan kembali bazar: Sejarah alami pasar. Princeton University Press.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Analisis data kualitatif: Buku sumber yang diperluas (edisi ke-2). Sage Publications.

North, D. C. (1990). Institusi, perubahan institusional, dan kinerja ekonomi. Cambridge University Press.

Ostrom, E. (2005). Memahami keragaman institusi. Princeton University Press.

Scott, W. R. (2014). Institusi dan organisasi: Ide, kepentingan, dan identitas (edisi ke-4). Sage Publications.

Stigler, G. J. (1961). Ekonomi informasi. Journal of Political Economy, 69(3), 213–225. https://doi.org/10.1086/258464

Williamson, O. E. (1985). Institusi ekonomi kapitalisme: Perusahaan, pasar, dan kontrak relasional. Free Press.